

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN MAESAN
DESA SUCO LOR

Sekretariat: Kantor Kepala Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH DESA SUCO LOR TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI (DIBUKA)	KONSEKUENSI (DITUTUP)	JANGKA WAKTU
1	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD/Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai	Terbuka dengan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai	Terbuka dengan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia; Bertentangan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka dengan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka dengan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan data pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS	Setelah terbit izin perceraian dan persetujuan tertulis
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS	Terbuka jika ada ijin untuk dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka dengan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka untuk data administrasi selain data pribadi/disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka untuk data administrasi selain data pribadi
10	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Informasi berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan hak pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka dengan persetujuan tertulis
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Informasi berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Akan menimbulkan keresahan	Melindungi data pribadi	Terbuka dengan persetujuan tertulis

14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi	Terbuka dengan persetujuan tertulis
15	Data Nilai Peserta Ujian CPNS, Ujian Dinas, KPPI	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
16	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku
17	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat; Keresahan masyarakat	Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan uji lab	Sampai terbitnya hasil uji
18	Dokumen/ Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kerahasiaan hasil uji mutu pangan atau data produsen	Sampai dengan terbitnya sertifikat
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja, dll)	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 i); UU No. 15 Tahun 2004 (Pasal 3)	Dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab	Membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dilaporkan kepada BPK
21	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 b, h); UU No. 4 Tahun 2009 (Pasal 88)	Terhambatnya proses evaluasi	Melindungi kerahasiaan perusahaan	Terbatas sampai proses evaluasi selesai
23	Dokumen Rekomendasi Teknis (IUP, Pengeboran Air, Ketenagalistrikan)	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 b, h, i); UU No. 4 Tahun 2009	Membuka rahasia perusahaan; persaingan tidak sehat	Melindungi kerahasiaan perusahaan	Sampai habis masa berlaku ijin
24	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdalin)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital	Meminimalisir gangguan obyek vital	Sampai dokumen diberlakukan
25	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, dan Anak Angkat	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Data pribadi tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi terjaga kerahasiaannya	Terbuka jika memberikan persetujuan tertulis
26	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Data pribadi tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi terjaga kerahasiaannya	Terbuka jika memberikan persetujuan tertulis
27	Hasil Pengawasan Koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 e); UU No. 25 Tahun 1992 (Pasal 39)	Menimbulkan keresahan, rush money, menurunnya kepercayaan	Menghindari rush money, menjaga kepercayaan masyarakat	Terbuka jika untuk pemeriksaan pidana
28	Surat/Memo / Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian perkara
29	Database Informan	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
30	Database Napiter	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
31	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)

32	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
33	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
34	Laporan Penanganan Konflik	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
35	Data Ex PKI	UU No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c, i); UU No. 17 Tahun 2011 (Pasal 25, 26)	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 tahun (dapat diperpanjang)
36	Usulan Upah Minimum Bupati ke Gubernur	UU No. 14/2008 (Pasal 17 i); UU No. 13/2003 (Pasal 89)	Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum	Menjaga iklim kondusif	Sampai upah minimum ditetapkan gubernur
37	Usulan Penangguhan Upah Minimum	UU No. 14/2008 (Pasal 17 i); UU No. 13/2003 (Pasal 90)	Menimbulkan keresahan	Menjaga iklim kondusif	Sampai terbit surat penangguhan
38	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan	UU No. 14/2008 (Pasal 17 i); UU No. 3/1951	Mengungkap hasil pemeriksaan dan rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha	Sampai dilaksanakannya hasil pemeriksaan
39	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi	UU No. 14/2008 (Pasal 17 a); UU No. 30/2002 (Pasal 15)	Masyarakat enggan berpartisipasi mengawasi KKN	Mendorong partisipasi masyarakat mengawasi KKN	Terbuka jika untuk pemeriksaan pengadilan
40	Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA)	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 13/2003 (Pasal 42)	Mengganggu Privasi TKA	Kepastian perlindungan terhadap TKA	Selama masa berlaku IMTA
41	Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Kelautan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 i)	Menghambat proses penyelidikan tindak pidana	Melindungi identitas informan/pelapor/saksi	Dapat dibuka untuk kepentingan pengadilan
42	Laporan Hasil Pengujian Mutu Organoleptik/Mikrobiologi/Kimia	UU No. 14/2008 (Pasal 17 b, i); UU No. 20/2014	Menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun
43	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 h)	Mengungkap data kinerja pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data tupoksi pegawai	Selama Undang-Undang membatasi
44	Data Pribadi Penduduk	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h, j); UU No. 24/2013	Bertentangan dengan hak pribadi	Melindungi Data Pribadi penduduk	Atas ijin yang bersangkutan / jabatan publik
45	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan (BPL2H)	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h, j); UU No. 30/2000	Melanggar Kode Etik kerjasama lab	Melindungi hak informasi konsumen	Terbuka jika mendapat persetujuan klien
46	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	UU No. 14/2008 (Pasal 17 b); UU No. 3/2014	Persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kerahasiaan hasil uji/kalibrasi	5 Tahun
47	Arsip Certificate of Origin (COO)	UU No. 14/2008 (Pasal 17 b); UU No. 3/2014	Mengganggu perlindungan HAKI	Melindungi HAKI dan persaingan usaha	5 Tahun
48	Rincian Nilai Investasi, Produksi dan Pemasaran Perusahaan	UU No. 14/2008 (Pasal 17); UU No. 30/2000; UU No. 3/2014	Mengganggu perlindungan HAKI	Melindungi HAKI dan persaingan usaha industri	10 Tahun
49	Identitas Korban Perlindungan Perempuan dan Anak	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 23/2004; UU No. 31/2014	Mengungkap rahasia pribadi (kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis bermaterai
50	Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 23/2002; UU No. 11/2012	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis bermaterai
51	Identitas Anak yang Konsultasi Telepon Program TESA 129	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 23/2002	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis bermaterai

52	Alamat Shelter Penampungan Korban	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 23/2004	Kelangsungan hidup korban terancam	Keamanan korban terlindungi	Sampai ada persetujuan tertulis bermaterai
53	Nama dan Alamat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 h)	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang aset	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi aset WP	Terbuka sampai WP memberi persetujuan
54	Source Code / Koding Aplikasi Samsat Online	UU No. 14/2008 (Pasal 17 b); UU No. 11/2008	Berpotensi disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab	Melindungi database sistem	Sampai ada perubahan sistem aplikasi
55	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail Trace Jalan	-	Menghambat kesuksesan kebijakan secara premature	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesai proses pembebasan tanah
56	Peta Rencana Struktur Ruang Raperda RT RW	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 e, 6 ayat 3)	Munculnya para spekulasi tanah	Melindungi Masyarakat dari spekulasi tanah	Sampai disahkannya Raperda menjadi Perda
57	Data Pelanggar Peraturan Daerah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 a, h)	Berpotensi pemerasan, menghambat penegakan perda	Melindungi privasi pelanggar perda	10 Tahun
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 a, h)	Bocornya informasi penindakan, bahaya petugas	Keberhasilan upaya penindakan lebih besar	5 Tahun
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Obyek Strategis	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c)	Mengganggu keamanan kunjungan Pejabat	Menjamin keselamatan Pejabat Negara	3 Tahun
60	Identitas Pelapor Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	UU No. 14/2008 (Pasal 17 h); UU No. 30/2002	Mengurangi partisipasi masyarakat	Melindungi Data Pribadi Pelapor	Terbuka jika dinyatakan di persidangan
61	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang dan Kualifikasi)	UU No. 14/2008 (Pasal 17 b); UU No. 5/1999; UU No. 30/2000	Terhambatnya proses penilaian, membuka rahasia	Menjaga objektivitas penilaian dan rahasia dagang	Terbatas sampai penetapan penyedia
62	Rincian Harga Penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14/2008 (Pasal 17 i, j); UU No. 30/2000	Membuka rahasia perusahaan	Melindungi hak rahasia dagang penyedia	Setelah penandatanganan kontrak
63	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS	UU No. 14/2008 (Pasal 17 i, j); UU No. 30/2000	Menghambat kesuksesan kebijakan pengadaan	Efisiensi anggaran dengan penawaran wajar	Sampai proses pengadaan selesai
64	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 c)	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi terbatas	Selama masih dibutuhkan
65	Aset/ Fasilitas / Instalasi Kritis / Sandi Pemerintah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Pasal 17 h)	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga hak akses	Selama masih dibutuhkan
RS-1	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa)	UU 14/2008; UU 44/2009; UU 29/2004	Menimbulkan keresahan, stigma negatif, kecurigaan berlebihan	Melindungi kepentingan pasien dan masyarakat	5 tahun atau jika dibuka di pengadilan
RS-2	RCA (Root Cause Analysis) Insiden di RS	UU 14/2008; UU 29/2004; UU 44/2009	Petugas enggan melaporkan insiden KTD/KNC	Menurunkan angka insiden sebagai bahan evaluasi	Terbuka dengan persetujuan Direksi
RS-3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	UU 14/2008; UU 29/2004; UU 44/2009	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	Terbuka jika ada sidang/persetujuan tertulis
RS-4	Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis	UU 14/2008; UU 44/2009	Mengungkap proses pelayanan kesehatan rahasia	Melindungi data dan proses pelayanan pasien	Terbuka dengan persetujuan tertulis tanpa identitas
RS-5	Rincian Harga Penawaran Calon Penyedia Anggaran BLUD	UU 14/2008; UU 30/2000	Membuka rahasia perusahaan	Melindungi hak rahasia dagang penyedia	Setelah penandatanganan kontrak
BUMD -1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD	UU 14/2008; UU 30/2000; UU 40/2007; UU 5/1962	Mengganggu perlindungan persaingan usaha sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha	Sampai pengesahan pemegang saham
BUMD -2	Perjanjian Kerjasama Usaha Pihak Ketiga BUMD	UU 14/2008; UU 30/2000	Mengganggu perlindungan persaingan usaha sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha	Sampai berakhirnya masa perjanjian

BUMD -3	Perincian Laporan Keuangan Perusahaan BUMD	UU 14/2008; UU 30/2000	Mengganggu perlindungan persaingan usaha sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
BUMD -4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga BUMD	UU 14/2008 (Pasal 17 d, i, j)	Membuka rahasia mitra melanggar perjanjian	Melindungi perseroan dan mitra	Sampai dengan persetujuan Mitra

Ditetapkan di Desa Suco Lor
pada tanggal 16 Februari 2026

SEKRETARIS DESA SUCO LOR
Selaku
Ketua PPID Desa Suco Lor,

EDY BAKHTIAR